



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLORA
PERIODE
1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora berdasarkan Perda No 13 Tahun 2011 adalah Dinas yang tergabung dalam Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2016 Dinas tersebut Terpecah menjadi tiga yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan. UPTD Terminal dan Parkir Wilayah I Cepu (Terminal Tipe A) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, UPTD Terminal dan Parkir Wilayah II Blora (Terminal Tipe B) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Type B, salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Blora yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora selaku Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran keuangan di entitasnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan tersebut berupa penyajian Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Adapun landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bora Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Bupati Bora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bora;
- Peraturan Bupati Bora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora;
- Peraturan Bupati Bora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bora;
- Peraturan Bupati Bora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bora;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Neraca
- 5.2. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blora adalah sebesar Rp. 8.545.470.000,00. Kemudian setelah perubahan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2018, total anggaran menjadi sebesar Rp. 8.714.920.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 169.450.000,00 (1,94 %). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	3.000.000.000,00	2.909.450.000,00	(90.550.000,00)	(3,02%)
Belanja Langsung	5.545.470.000,00	5.805.470.000,00	260.000.000,00	4,47 %
Total Anggaran	8.545.470.000,00	8.714.920.000,00	169.450.000,00	1,94 %

Pada mata anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan jumlah anggaran, dari yang semula sebesar Rp. 3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.909.450.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 90.550.000,00 (3,02%).

Sedangkan pada mata anggaran Belanja Langsung mengalami perubahan jumlah anggaran dari yang semula sebesar Rp. 5.545.470.000,00 menjadi Rp. 5.805.470.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 260.000.000,00 (4,47 %).

Pengurangan jumlah anggaran Belanja Langsung terjadi pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 75.750.000,00 (4,26%) dengan rincian. kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode program/kegiatan (01.002) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 1.117.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 980.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 137.000.000,00 (12,26%), kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode program/kegiatan (01.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 4.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 2.500.000,00 (62,50%), kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode program/kegiatan (01.011) jumlah anggaran semula Rp. 17.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 26.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 9.000.000,00 (52,94%), kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode program/kegiatan (01.012) jumlah

anggaran semula Rp 12.000.000,00 menjadi Rp. 17.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp 5.000.000,00 (41,67%). Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode program/kegiatan (01.013) jumlah anggaran semula Rp. 115.839.400,00 menjadi Rp.165.589.400,00 atau bertambah sebesar Rp. 49.750.000,00 (42,95%). Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman kode program/kegiatan (01.017) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 75.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 90.500.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 15.000.000,00 (19,87%), kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah kode program/kegiatan (01.018) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 160.000.000,00 menjadi Rp. 180.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp 20.000.000,00 (12,50%), kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah kode program/kegiatan(01.019) jumlah anggaran semula sebesar Rp 60.000.000,00 menjadi Rp. 25.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp 35.000.000,00 (58,33%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertambah sebesar Rp. 24.300.000,00 (8,13%) dengan rincian kegiatan Pembangunan Gedung kantor kode program/kegiatan (02.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 50.600.000,00 menjadi sebesar Rp. 0,00 atau berkurang sebesar Rp. 50.600.000,00 (100,00%), kegiatan Pengadaan Mebeler kode program/kegiatan (02.010) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 95.100.000,00 menjadi sebesar Rp. 110.800.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 15.700.000,00 (16,51%). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kode program/kegiatan (02.022) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 35.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 73.700.000,00 atau bertambah sebesar Rp 38.700.000,00 (110,57%), kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kode program/kegiatan (02.024) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 65.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 85.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp 20.000.000,00 (30,77%), kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler kode program/kegiatan (02.029) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 13.170.000,00 menjadi sebesar Rp. 13.670.000,00 atau bertambah sebesar Rp 500.000,00 (3,80%).

Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum berkurang sebesar Rp. 2.700.000,00 (2,96%) dengan rincian Kegiatan Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan, Kebersihan, Sopir dan Tenaga Lepas Lainnya kode program/kegiatan (09.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 91.200.000,00 menjadi Rp. 88.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 2.700.000,00 (2,96%).

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertambah sebesar Rp. 85.075.000,00 (6,88%) dengan rincian kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi kode program/kegiatan (15.002) jumlah anggaran semula sebesar Rp.

447.590.000,00 menjadi sebesar Rp. 523.790.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 76.200.000,00 (17,02%), kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi kode program/kegiatan (15.005) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 475.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 400.875.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 74.125.000,00 (15,61%), kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi kode program/kegiatan (15.006) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 249.420.000,00 menjadi sebesar Rp. 259.420.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 10.000.000,00 (4,01%), kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi kode program/kegiatan (15.007) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 50.390.000,00 menjadi sebesar Rp. 123.390.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 73.000.000,00 (144,87%).

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi bertambah sebesar Rp. 81.000.000,00 (84,38%) dengan rincian kegiatan Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi kode program/kegiatan (17.001) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 96.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 177.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 81.000.000,00 (84,38%).

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media bertambah sebesar Rp. 80.000.000,00 (9,25%) dengan rincian kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat kode program/kegiatan (18.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 42.100.000,00 menjadi sebesar Rp. 122.100.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 80.000.000,00 (190,02%).

Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika bertambah sebesar Rp. 68.075.000,00 (21,65%) dengan rincian kegiatan Penyediaan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi kode program/kegiatan (21.003) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 231.900.000,00 menjadi sebesar Rp. 224.250.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 7.650.000,00 (3,30%), kegiatan Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho dan Lainnya kode program/kegiatan (21.005) jumlah anggaran semula sebesar Rp. 32.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 107.725.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 75.725.000,00 (236,64%).

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora tahun 2018 dituangkan ke dalam 16 Program kerja Belanja Langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum;

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
9. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
11. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media;
12. Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah;
13. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pada SKPD yang Menangani Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi di Daerah;
14. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika;
15. Program Koordinasi Terpadu Bidang Perekonomian;
16. Program Sandi dan Telekomunikasi.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora pada tahun 2018. Dari 16 Program di atas terbagi menjadi 48 kegiatan Belanja Langsung. Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora, Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh fungsi Sekretariat, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Bidang Statistik Persandian dan Telekomunikasi.

Secara keseluruhan total anggaran (setelah perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bora tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.714.920.000,00 dan penyerapan anggaran di tahun 2018 sebesar Rp. 8.455.082.199,00 (97,02%).

Anggaran yang terealisasi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional selama tahun 2018. Pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora tidak menghasilkan Pendapatan, akan tetapi di Tahun 2018 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Mempunyai Pendapatan dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 486.700.002,00. Jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.714.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.455.082.199,00 (97,02%) yaitu terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.911.664.749,00 (96,86%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.135.755.600,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.543.417.450,00 (97,74%) dari anggaran sebesar Rp. 1.579.164.400,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.888.654.530,00 (99,28%) dari anggaran sebesar Rp 2.909.450.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.566.427.669,00 (95,88%) dari anggaran sebesar Rp. 5.805.470.000,00.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Target kinerja yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Persentase
Belanja Tidak Langsung	2.909.450.000,00	2.888.654.530,00	(99,28%)
Belanja Langsung	5.805.470.000,00	5.566.427.669,00	(95,88%)
Total	8.714.920.000,00	8.455.082.199,00	(97,02%)

Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik (Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2016, pasal 2 ayat 1), Program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang positif terhadap situasi dan kondisi secara umum di wilayah Kabupaten Blora.

Pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan prosentase 94,89%, yaitu:
 - Tersedianya jasa surat menyurat dengan prosentase 77,85%
 - Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan prosentase 97,87%.
 - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan prosentase 41,71%.
 - Tersedianya jasa administrasi keuangan dengan prosentase 99,35%.
 - Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan prosentase 98,00%.
 - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja dengan prosentase 36,87%
 - Tersedianya alat tulis kantor dengan prosentase 89,07%.
 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan prosentase 73,26%.
 - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan prosentase 78,38%.
 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan prosentase 98,58%.
 - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan prosentase 94,17%.
 - Tersedianya makanan dan minuman dengan prosentase 83,88%.

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan prosentase 99,81%.
 - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan prosentase 82,78%.
- b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dengan prosentase 89,91 %, yaitu:
- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan prosentase 90,49%
 - Terlaksananya pengadaan mebeler dengan prosentase 99,57%.
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan prosentase 98,37%
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan prosentase 82,68%.
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeler dengan prosentase 9,28%
- c. Meningkatnya kedisiplinan Aparatur dengan prosentase 99,69%, yaitu:
- Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dengan prosentase 99,69%.
- d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan prosentase 44,13%, yaitu:
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal dengan prosentase 44,13%.
- e. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan prosentase 34,07%, yaitu:
- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan prosentase 34,07%.
- f. Meningkatnya Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum dengan prosentase 100,00%, yaitu:
- Tersedianya honorarium bagi tenaga pengaman, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya dengan prosentase 100,00%.
- g. Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan prosentase 98,43%, yaitu:
- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan prosentase 99,32%.
 - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi dengan prosentase 100,00%.
 - Terlaksananya pengadaan alat studio dan komunikasi dengan prosentase 98,13%.
 - Terlaksananya Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan prosentase 97,74%.

- Terlaksananya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi dengan prosentase 96,94%
- h. Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan prosentase 99,53%.
- Tersusunnya pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah dengan prosentase 98,93%
 - Tersusunnya pengelolaan, updating dan analisis data PDRB dengan prosentase 100,00%
 - Tersusunnya IKK dengan prosentase 99,80%
- i. Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan prosentase 100,00%, yaitu:
- Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian dalam Bidang Informasi dan Komunikasi dengan prosentase 100,00%.
- j. Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi dengan prosentase 85,63%, yaitu:
- Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi dengan prosentase 85,63%.
- k. Terjalinnnya Kerjasama Informasi dengan mas media dengan prosentase 98,44%, yaitu:
- Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prosentase 98,98%.
 - Tersebarluasnya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dengan prosentase 94,84%.
- l. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dengan prosentase 99,32%.
- Tercapainya koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD lintas vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal dengan prosentase 100,00%
 - Terjalinnnya sinergitas dan kemitraan pemerintah dan media massa dengan prosentase 99,10%
 - Tercapainya Revitalisasi pendayagunaan media center daerah dengan prosentase 100,00%
 - Tersusunnya desain detail jaringan komunikasi dengan prosentase 100,00%
 - Terjalinnnya pemberdayaan KIM dan FK metra dengan prosentase 98,94%
- m. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pada SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi di daerah dengan prosentase 99,95%
- Terlaksananya Orientasi atas SKPD tentang keterbukaan informasi publik dengan prosentase 99,95%

- n. Meningkatnya tata laksana komunikasi dan informatika dengan prosentase 92,98%.
 - Tersedia dan terlaksananya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan prosentase 89,75%
 - Terlaksananya pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya dengan prosentase 97,49%
 - Terjalannya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi dengan prosentase 97,59%
- o. Terlaksananya koordinasi terpadu bidang perekonomian dengan prosentase 99,72%.
 - Terlaksananya Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT) dengan prosentase 99,72%
- p. Berkembangnya sandi dan telekomunikasi dengan prosentase 99,13%.
 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi dengan prosentase 100,00%.
 - Meningkatnya SDM sandi dan telekomunikasi dengan prosentase 96,95%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. **8.714.920.000,00** terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) jumlah anggaran sebesar Rp. 2.909.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.888.654.530,00 (99,28%) dan Belanja Langsung yang terdiri dari 16 Program terbagi menjadi 48 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.805.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.566.427.669,00 (95,88%). Dari jumlah total tersebut (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) telah terealisasi sebesar Rp. **8.455.082.199,00** atau **97,02%** dari pagu anggaran. Keseluruhan jumlah Anggaran dan Realisasi per kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Prog /Keg	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2017 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.909.450.000,00	2.888.654.530,00	99,28
	Belanja Pegawai	2.909.450.000,00	2.888.654.530,00	99,28
	BELANJA LANGSUNG	3.858.937.298,00	3.516.749.475,00	91,00
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.702.509.400,00	1.615.557.899,00	94,89
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.114.000,00	77,85
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	980.000.000,00	959.090.371,00	97,87
003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,00	6.256.325,00	41,71
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90.000.000,00	89.415.000,00	99,35
008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	24.520.000,00	9.040.900,00	36,87
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.000.000,00	40.973.500,00	89,07
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	19.047.000,00	73,26
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000,00	13.325.000,00	78,38
013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.589.400,00	163.229.900,00	98,58
015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.400.000,00	21.095.000,00	94,17

017	Penyediaan Makanan dan Minuman	90.500.000,00	75.908.000,00	83,88
018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	180.000.000,00	179.666.669,00	99,81
019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	25.000.000,00	20.696.234,00	82,78
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	323.370.000,00	290.751.490,00	89,91
005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40.200.000,00	36.378.000,00	90,49
010	Pengadaan mebeler	110.800.000,00	110.326.000,00	99,57
022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	73.700.000,00	72.500.000,00	98,37
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000,00	70.278.490,00	82,68
029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	13.670.000,00	1.269.000,00	9,28
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.000.000,00	39.875.000,00	99,69
03	Pengadaan Pakaian kerja Lapangan	40.000.000,00	39.875.000,00	99,69
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.540.600,00	10.830.000,00	44,13
01	Pendidikan dan pelatihan formal	24.540.600,00	10.830.000,00	44,13
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.000.000,00	7.155.000,00	34,07
01	Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja SKPD	21.000.000,00	7.155.000,00	34,07
09	Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum	88.500.000,00	88.500.000,00	100,00
03	Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya	88.500.000,00	88.500.000,00	100,00
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.322.475.000,00	1.301.769.150,00	98,43
002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	523.790.000,00	520.235.150,00	99,32
003	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
005	Pengadaan alat studio dan komunikasi	400.875.000,00	393.360.000,00	98,13
006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	259.420.000,00	253.556.000,00	97,74
007	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	123.390.000,00	119.618.000,00	96,94
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	160.000.000,00	159.258.000,00	99,53
002	Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah	60.000.000,00	59.358.000,00	98,93
004	Pengelolaan, updating dan analisis data PDRB	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
006	Penyusunan IKK	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80
16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
17	Program dan fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	177.000.000,00	151.556.500,00	85,63
001	Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	177.000.000,00	151.556.500,00	85,63
18	Program Kerjasama Informasi dengan mas media	944.600.000,00	929.877.900,00	98,44
002	Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	822.500.000,00	814.077.900,00	98,98
003	Penyebarnya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	122.100.000,00	115.800.000,00	94,84
19	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi	325.700.000,00	323.487.485,00	99,32
002	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
003	Penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dan media massa	215.000.000,00	213.057.725,00	99,10
005	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
007	Penyusunan desain detail jaringan komunikasi	50.300.000,00	50.299.760,00	100,00

015	Pemberdayaan KIM dan FK Metra	25.400.000,00	25.130.000,00	98,94
20	Program peningkatan kapasitas SDM aparatur pada SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi di daerah	22.000.000,00	21.990.000,00	99,95
009	Orientasi atas SKPD tentang keterbukaan informasi publik	22.000.000,00	21.990.000,00	99,95
21	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika	383.775.000,00	356.847.245,00	92,98
003	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi	224.250.000,00	201.272.250,00	89,75
005	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya	107.725.000,00	105.025.000,00	97,49
009	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	51.800.000,00	50.549.995,00	97,59
36	Program koordinasi terpadu bidang perekonomian	150.000.000,00	149.582.000,00	99,72
009	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	150.000.000,00	149.582.000,00	99,72
42	Program sandi dan telekomunikasi	70.000.000,00	69.390.000,00	99,13
001	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
002	Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi	20.000.000,00	19.390.000,00	96,95
	Jumlah	8.714.920.000,00	8.455.082.199,00	97,02

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target antara lain:

- Jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami kemunduran dan tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga realisasi pencapaian target tidak bisa maksimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bloro sebagai Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan secara berkala kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bloro selaku Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bloro.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bloro Tahun Anggaran 2018 yaitu Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan menerbitkan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

✓ **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui :

- a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
- b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.
- c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

✓ **Pengukuran**

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.
- b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ **Definisi**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

✓ **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
 - 2) konsumsi barang/ jasa non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

✓ **Pengukuran**

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

✓ **Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ **Pengakuan**

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

✓ **Pengukuran**

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

✓ **Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ **Pengakuan**

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Blora;

✓ **Pengukuran**

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

✓ Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✓ Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengakuan

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.494.983.220,88 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 5.084.000,00 Aset Tetap (netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 3.281.330.720,88 dan Aset Lainnya (netto setelah dikurangi akumulasi amortisasi) sebesar Rp. 208.568.500,00. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 8.791.749,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 2.779.003.944,69

Secara umum rincian Laporan Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. ASET	3.494.983.220,88	2.788.620.868,69
2. KEWAJIBAN	8.791.749,00	9.616.924,00
3. EKUITAS	3.486.191.471,88	2.779.003.944,69

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. ASET	3.494.983.220,88	2.788.620.868,69

Nilai Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora per 31 Desember 2017 Rp. 3.494.983.220,88. Terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1 ASET LANCAR	5.084.000,00	3.701.000,00
1.2 ASET TETAP	3.281.330.720,88	2.528.433.268,69
1.3 ASET LAINNYA	208.568.500,00	256.486.600,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1 ASET LANCAR	5.084.000,00	3.701.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1.1 Persediaan	5.084.000,00	3.701.000,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 5.084.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Persediaan Alat Tulis Kantor	3.816.000,00	2.726.000,00
b. Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.268.000,00	975.000,00
Total Persediaan	5.084.000,00	3.701.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2 ASET TETAP	3.281.330.720,88	2.528.433.268,68

Nilai Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 Rp. 3.281.330.720,88 Terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.1 Tanah	384.000.000,00	384.000.000,00

Nilai Perolehan Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 384.000.000,00. **Tanah dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-A) Tanah**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)
Tanah:	384.000.000,00
- Tanah Kantor	384.000.000,00
Jumlah	384.000.000,00

Nilai perolehan tanah per 31 Desember 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 384.000.000,00.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.2 Peralatan dan Mesin	5.689.635.050,00	4.791.269.500,00

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.689.635.050,00 **Peralatan dan Mesin dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin untuk nilai di atas/sama dengan Rp. 300.00,00**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Alat-alat Berat:	7.600.000,00	7.600.000,00
- Alat-alat Berat	7.600.000,00	7.600.000,00
Alat-alat Angkutan:	804.019.000,00	767.641.000,00
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	804.019.000,00	767.641.000,00
Alat Bengkel:	235.033.650,00	35.900.000,00
- Alat-alat Bengkel	235.033.650,00	35.900.000,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	3.280.512.400,00	2.974.628.500,00
- Peralatan Kantor	133.514.400,00	52.750.000,00
- Perlengkapan Kantor	146.737.000,00	108.801.000,00
- Komputer	2.774.968.250,00	2.690.614.750,00
- Meubelair	209.232.750,00	112.382.750,00
- Peralatan Dapur	12.060.000,00	10.080.000,00
- Penghias Ruangan Rumah Tangga	26.392.950,00	22.392.950,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi:	1.446.262.050,00	980.107.050,00
- Alat-alat Studio	1.345.571.050,00	919.816.050,00
- Alat-alat Komunikasi	100.691.000,00	60.291.000,00
Jumlah	5.689.635.050,00	4.791.269.500,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018	Rp. 4.791.269.500,00
Penambahan Tahun 2018	Rp. 1.007.550.550,00
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 109.185.000,00
Mutasi Tahun 2018	Rp. 1.116.735.550,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 5.689.635.050,00

Akumulasi Penyusutan	Rp. (3.923.649.406,37)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp. 1.765.985.643,63

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar Rp. 1.007.550.550,00 berasal dari Realisasi Belanja Modal, (Pengadaan Tahun Anggaran 2018) yang memenuhi syarat kapitalisasi nilai aset di atas Rp. 300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset dari Ralisasi Belanja Modal :

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	36.378.000,00
Alat-alat Bengkel	Rp.	199.133.650,00
Peralatan Kantor	Rp.	80.764.400,00
Perlengkapan Kantor	Rp.	37.936.000,00
Komputer	Rp.	84.353.500,00
Meubelair	Rp.	96.850.000,00
Peralatan Dapur	Rp.	1.980.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp.	4.000.000,00
Alat-alat Studio	Rp.	425.755.000,00
Alat-alat Komunikasi	Rp.	40.400.000,00
Jumlah	Rp.	1.007.550.550,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	36.378.000,00
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	36.378.000,00
2 unit @ Rp. 18.189.000,00		
Alat-alat Bengkel	Rp.	199.133.650,00
- Mesin Generator	Rp.	199.133.650,00
1 unit @ Rp 199.133.650,00		
Peralatan Kantor	Rp.	80.764.400,00
- Papan Visual Elektronik	Rp.	7.439.400,00
1 unit @ Rp 7.439.400,00		
- Neon Box	Rp.	73.325.000,00
15 unit @ Rp. 4.888.333,33		
Perlengkapan Kantor	Rp.	37.936.000,00
- Almari	Rp.	5.850.000,00
1 unit @ Rp. 5.850.000,00		
1 unit @ Rp. 3.626.000,00	Rp.	3.626.000,00
- AC	Rp.	9.460.000,00
1 unit @ Rp. 9.460.000,00		
3 unit @ Rp. 5.000.000,00	Rp.	15.000.000,00

- Tiang Bendera			
2 unit @ Rp. 750.000,00	Rp.	1.500.000,00	
- Mimbar/Podium			
1 unit @ Rp 2.500.000,00	Rp.	2.500.000,00	
Komputer			Rp. 84.353.500,00
- Komputer PC			
2 unit @ Rp 17.435.000,00	Rp.	34.870.000,00	
1 unit @ Rp. 17.798.000,00	Rp	17.798.000,00	
- Komputer Notebook			
3 unit @ Rp 7.920.000,00	Rp.	23.760.000,00	
Printer			
1 unit @ Rp. 2.165.250,00	Rp.	2.165.250,00	
1 unit @ Rp. 5.760.250,00	Rp.	5.760.250,00	
Meubelair			Rp. 96.850.000,00
Meja kerja			
5 unit @ Rp 2.000.000,00	Rp	10.000.000,00	
- Meja Resepsionis			
4 unit @ Rp. 700.000,00	Rp	2.800.000,00	
- Meja Komputer			
4 unit @ Rp. 1.200.000,00	Rp	4.800.000,00	
- Meja Rapat			
9 unit @ 5.500.000,00	Rp	49.500.000,00	
- Sofa			
1 unit @ Rp. 5.850.000,00	Rp	5.850.000,00	
- Kursi Rapat			
40 unit @ Rp. 597.500,00	Rp.	23.900.000,00	
Peralatan Dapur			Rp. 1.980.000,00
Kulkas			
1 unit @ Rp. 1.980.000,00	Rp.	1.980.000,00	
Penghias Ruangan Rumah			Rp. 4.000.000,00
Tangga			
- Gorden	Rp.	4.000.000,00	
Alat-alat Studio			Rp. 425.755.000,00
Kamera			
1 unit @ Rp. 33.700.000,00	Rp.	33.700.000,00	
1 unit @ Rp. 30.100.000,00	Rp.	30.100.000,00	
1 unit @ Rp. 24.145.000,00	Rp.	24.145.000,00	
TV			
1 unit @ Rp. 14.485.000,00	Rp.	14.485.000,00	
- Sound System			
1 unit @ Rp. 19.965.000,00	Rp.	19.965.000,00	

- Peralatan Studio Audio			
1 unit @ Rp. 78.625.000,00	Rp.	78.625.000,00	
1 unit @ Rp. 100.125.000,00	Rp.	100.125.000,00	
2 unit @ Rp. 34.650.000,00	Rp.	69.300.000,00	
1 unit @ Rp. 30.965.000,00	Rp.	30.965.000,00	
Alat-alat Komunikasi		Rp.	40.400.000,00
- Alat Sandi			
1 unit @ Rp. 40.400.000,00	Rp.	40.400.000,00	
Jumlah		Rp.	1.007.550.550,00

Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar Rp. **109.185.000,00** berasal dari Koreksi Aset yaitu Reklasifikasi Aset KIB B menjadi KIB C dengan rincian sebagai berikut:

Pengurangan Aset karena Koreksi Aset :

Komputer:	Rp.	109.185.000,00
- Komputer Mainframe Server	Rp.	109.185.000,00
Jumlah	Rp.	109.185.000,00

Komputer Mainframe Server sebesar Rp. 109.185.000,00 direklasifikasi dari Kelompok Kartu Inventaris Barang (KIB B) menjadi Kelompok Kartu Inventaris Barang (KIB C) Yaitu Gedung Kantor.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.3 Gedung dan Bangunan	966.864.300,00	635.996.400,00

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **966.864.300,00 Gedung dan Bangunan dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-C) Gedung dan Bangunan**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Gedung Kantor:	966.864.300,00	635.996.400,00
- Gedung Kantor	438.287.000,00	329.102.000,00
- Bangunan pagar/gapura/taman	48.700.000,00	48.700.000,00
- Bangunan Sarana Papan Reklame	479.877.300,00	258.194.400,00
Jumlah	966.864.300,00	635.996.400,00

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018		Rp.	635.996.400,00
Penambahan Tahun 2018	Rp.	330.867.900,00	
Pengurangan Tahun 2018	Rp.	0,00	
Mutasi Tahun 2018		Rp.	330.867.900,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018		Rp.	966.864.300,00
Akumulasi Penyusutan		Rp.	(83.625.529,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018		Rp.	883.238.771,00

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar **Rp. 330.867.900,00** berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal (Pengadaan Tahun Anggaran 2018)
2. Koreksi Aset

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

1. Realisasi Belanja Modal (Pengadaan Tahun Anggaran 2018)

Penambahan aset gedung dan bangunan yang merupakan realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset karena Realisasi Belanja Modal :

Gedung Kantor		221.682.900,00
- Bangunan Sarana Papan Reklame		221.682.900,00
Lain-lain (Jasa Perencanaan, Jasa Pengawasan, Honor Panitia, ATK, Penggandaan)		
Jumlah		221.682.900,00

2. Koreksi Aset

Penambahan aset gedung dan bangunan yang merupakan koreksi aset yaitu pelimpahan Kartu Inventaris Barang B (KIB-B) ke Kartu Inventaris Barang C (KIB-C) dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset karena koreksi aset

Gedung kantor	Rp.	109.185.000,00
- Gedung kantor		109.185.000,00
- Lain-lain (Jasa Perencanaan, Jasa Pengawasan, Honor Panitia, ATK, Penggandaan)		
Jumlah	Rp.	109.185.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	267.236.500,00	238.887.500,00

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **267.236.500,00** Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB-D) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Jaringan Air	6.500.000,00	6.500.000,00
- Sumur Pompa	6.500.000,00	6.500.000,00
Instalasi Listrik dan Telepon	260.736.500,00	232.387.500,00
- Jaringan Listrik	16.055.000,00	16.055.000,00
- Jaringan Wifi	244.681.500,00	216.332.500,00
Jumlah	267.236.500,00	238.887.500,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2018	Rp. 238.887.500,00
Penambahan Tahun 2018	Rp. 73.299.000,00
Pengurangan Tahun 2018	Rp. 44.950.000,00
Mutasi Tahun 2018	Rp. 28.349.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 267.236.500,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. (19.130.193,75)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp. 248.106.306,25

Penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 sebesar **Rp. 73.299.000,00** berasal dari Reklasifikasi aset dari Kartu Inventaris Barang B (KIB B) yaitu Peralatan Jaringan Komputer ke Kartu Inventaris Barang D (KIB D) yaitu Jaringan Wifi karna berupa Jaringan WAN. Rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset karena Reklasifikasi :	
Instalasi Listrik dan Telepon	73.299.000,00
- Jaringan Wifi	73.299.000,00
Jumlah	73.299.000,00

Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 sebesar **Rp. 44.950.000,00** berasal dari koreksi aset dengan rincian sebagai berikut :

Pengurangan Aset karena Koreksi Aset :	
Instalasi Listrik dan Telepon	44.950.000,00
- Jaringan Wifi	44.950.000,00
Jumlah	44.950.000,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.026.405.129,12)	(3.521.720.131,31)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **(4.026.405.129,12)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Akun Aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut adalah sebagai berikut

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	(3.923.649.406,37)	(3.445.142.182,46)
- Alat-alat berat	(31.400.000,00)	(31.400.000,00)
- Alat-alat angkutan darat bermotor	(642.682.880,95)	(604.057.666,67)
- Alat bengkel bermesin	(18.681.970,83)	(1.337.500,00)
- Alat ukur	(132.003.333,33)	(102.233.333,33)
- Peralatan kantor	(69.812.346,67)	(59.609.333,33)
- Penghias ruangan rumah tangga	(456.101.010,00)	(362.286.119,98)
- Komputer	(1.950.261.593,75)	(1.749.754.770,82)
- Meubelair	(13.594.250,00)	(12.769.250,00)
- Alat-alat Studio	(313.502.250,00)	(269.194.833,33)
- Alat-alat Komunikasi	(70.728.416,67)	(59.060.416,67)
- Peralatan pemancar	(223.827.708,33)	(193.438.958,33)
- Alat-alat Laboratorium	(1.053.645,14)	(0,00)
- Alat Peraga Praktek Sekolah	(324.479,17)	(0,00)
2. Gedung dan Bangunan	(83.625.529,00)	(66.577.803,33)
- Gedung Kantor	(83.625.529,00)	(66.577.803,33)
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	(19.130.193,75)	(10.000.145,83)
- Jaringan air	(650.000,00)	(520.000,00)
- Jaringan listrik	(4.607.000,00)	(4.071.833,33)
- Jaringan Telepon	(13.873.193,75)	(5.408.312,50)

Jumlah	4.026.405.129,12	3.521.720.131,31
---------------	-------------------------	-------------------------

Barang Inventaris yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset (nilai di bawah Rp.300.000,-)	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	11.130.250,00	11.130.250,00

Barang Inventaris yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset (nilai di bawah Rp. 300.000,-)

Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin telah dikelompokkan tersendiri barang-barang dengan nilai **di bawah Rp. 300.000,00**. Pengurus Barang mengklasifikasikan barang-barang tersebut sebagai barang Inventaris. Saldo barang Inventaris tersebut per 31 Desember 2018 sejumlah **Rp. 11.130.250,00**. Nilai perolehan barang inventaris ini masih sama dengan nilai perolehan tahun sebelumnya. Dimana artinya tidak terjadi penambahan maupun pengurangan nilai perolehan. Dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp 10.710.250,00). Peralatan dan Mesin tersebut tidak termasuk ke dalam Aset Tetap dicatat di **Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Peralatan dan Mesin untuk nilai di bawah Rp. 300.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Perlengkapan Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00
- Gambar Bupati dan Wakil Bupati	1.200.000,00	1.200.000,00
- Porforator	125.000,00	125.000,00
- Perlengkapan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00
- Kipas Angin	215.000,00	215.000,00
Komputer	1.010.000,00	1.010.000,00
- Kelengkapan Komputer	660.000,00	660.000,00
- UPS Stabilizer	350.000,00	350.000,00
Meubelair	6.808.500,00	6.808.500,00
- Meja Kerja	2.020.000,00	2.020.000,00
- Kursi Lipat	4.165.000,00	4.165.000,00
- Kursi Kerja	623.500,00	623.500,00
Alat – alat Studio	1.166.750,00	1.166.750,00
- Power Supply	280.000,00	280.000,00
- Peralatan Studio Audio	806.750,00	806.750,00
- Microphone	80.000,00	80.000,00
Alat – alat ukur	105.000,00	105.000,00
- Timbangan	105.000,00	105.000,00

Total	11.130.250,00	11.130.250,00
--------------	----------------------	----------------------

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	208.568.500,00	256.486.600,00

1.3 ASET LAINNYA

Nilai Aset lainnya yaitu sebesar Rp. 208.568.500,00 terdiri dari pengurangan nilai aset tak berwujud sebesar Rp. 503.180.500,00 dengan nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp. 294.612.000,00

1.3.1 Aset tak berwujud

Aset tak berwujud yang terdapat dalam rincian Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Aset tak berwujud diatas Rp. 20.000.000,00 nilainya per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 503.180.500,00** rinciannya sebagai berikut

Alat komunikasi	Rp.	48.850.000,00
Alat sandi	Rp.	48.850.000,00
Komputer	Rp.	454.330.500,00
Software	Rp.	454.330.500,00
Jumlah	Rp.	503.180.500,00

Sedangkan untuk aset tak berwujud yang bernilai kurang dari Rp. 20.000.000,00 yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B) nilainya sebesar Rp. **42.341.850,00** rinciannya sebagai berikut :

Komputer	Rp.	42.341.850,00
Software	Rp.	42.341.850,00
Jumlah	Rp.	42.341.850,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	294.612.000,00	209.168.900,00

1.3.2 Akumulasi Amortisasi

Akumulasi amortisasi yang terdapat dalam rincian Kartu Inventaris Barang (KIB-B) Aset tak berwujud diatas Rp. 20.000.000,00 nilainya sebesar **(Rp. 294.612.000,00)** rinciannya sebagai berikut :

		2018 (Rp)	2017 (Rp)
Alat komunikasi	Rp.	48.850.000,00	48.850.000,00
Alat sandi	Rp.	48.850.000,00	48.850.000,00
Komputer	Rp.	245.762.000,00	160.318.900,00
Software	Rp.		160.318.900,00
Jumlah	Rp.	(294.612.000,00)	(209.168.900,00)

2. KEWAJIBAN

2018 (Rp)	2017 (Rp)
8.786.749,00	9.616.924,00

Nilai Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 Rp 8.786.749,00. Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.786.749,00	9.616.924,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 Rp. 8.786.749,00. Terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya	8.791.749,00	9.616.924,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.791.749,00. Utang Jangka Pendek merupakan utang yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang tersebut antara lain Beban Telepon dan Listrik, dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Telepon	Rp.	214.102,00
- Beban Listrik	Rp.	8.577.647,00
Jumlah	Rp.	8.791.749,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3. EKUITAS	4.482.190.725,12	5.417.738.983,31

Nilai Jumlah Ekuitas tersebut merupakan selisih antara Ekuitas dan RK PPKD dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3.1 EKUITAS	(4.482.190.725,12)	(5.417.738.983,31)

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar (4.482.190.725,12) Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3.2 RK PPKD	7.968.382.197,00	8.196.742.928,00

Nilai RK PPKD per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.968.382.197,00

5.2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 486.700.002,00. Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.455.082.199,00 atau mencapai 97,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.714.920.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. PENDAPATAN	417.000.000,00	486.700.002,00	0,00
2. BELANJA	8.714.920.000,00	8.455.082.199,00	8.196.742.928,00

Rincian anggaran dan realisasi tersebut diuraikan di bawah ini:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1. PENDAPATAN	417.000.000,00	486.700.002,00	0,00

Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora meliputi Pendapatan Retribusi Daerah. Dalam Hal ini Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp. 417.000.000,00 dan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 486.700.002,00 (116,71%).

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2. BELANJA	8.714.920.000,00	8.455.082.199,00	8.196.742.928,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 8.455.082.199,00** atau 97,02% dari anggaran sebesar **Rp. 8.714.920.000,00** Terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.911.664.749,00 atau 96,86%; realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.543.417.450,00 atau 97,74%.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1 BELANJA OPERASI	7.135.755.600,00	6.911.664.749,00	6.867.832.428,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 6.911.664.749,00** atau **96,86%**; Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.431.381.530,00 atau 98,84% dan Belanja Barang sebesar Rp. 3.480.283.219,00 atau 94,98%.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1.1 Belanja Pegawai	3.471.635.000,00	3.431.381.530,00	5.121.440.453,00

Pada Tahun 2018 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.471.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.431.381.530,00 atau 98,84%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Gaji dan Tunjangan	1.978.100.000,00	1.966.384.530,00	3.517.879.053,00

b. Tambahan Penghasilan PNS	910.500.000,00	901.420.000,00	1.162.114.400,00
c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
d. Honorarium PNS	278.675.000,00	271.070.000,00	238.775.000,00
e. Honorarium Non PNS	283.510.000,00	271.657.000,00	202.672.000,00
Total Belanja Pegawai	3.471.635.000,00	3.431.381.530,00	5.121.440.453,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Gaji dan Tunjangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Gaji pokok PNS/uang representasi	1.448.900.000,00	1.442.999.400,00
- Tunjangan keluarga	146.500.000,00	145.493.902,00
- Tunjangan jabatan	169.700.000,00	168.690.000,00
- Tunjangan fungsional	51.000.000,00	50.430.000,00
- Tunjangan fungsional umum	34.000.000,00	33.535.000,00
- Tunjangan beras	70.500.000,00	69.957.720,00
- Tunjangan PPh/tunjangan khusus	3.500.000,00	3.280.106,00
- Pembulatan gaji	500.000,00	22.180,00
- Iuran asuransi kesehatan	41.500.000,00	40.918.370,00
- Iuran asuransi kecelakaan kerja dan Kematian	12.000.000,00	11.057.852,00
Total Gaji dan Tunjangan	1.978.100.000,00	1.966.384.530,00

b. Tambahan Penghasilan PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	910.500.000,00	901.420.000,00
Total Tambahan Penghasilan PNS	910.500.000,00	901.420.000,00

c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.850.000,00	20.850.000,00
Total Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.850.000,00	20.850.000,00

d. Honorarium PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Honorarium Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan	170.895.000,00	168.655.000,00
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00
- Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah	89.940.000,00	89.415.000,00
- Uang Lembur PNS	15.440.000,00	10.600.000,00
Total Honorarium PNS	278.675.000,00	271.070.000,00

e. Honorarium Non PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	242.650.000,00	240.550.000,00
- Honorarium Tenaga Kasar/Harian Lepas	9.500.000,00	1.600.000,00
- Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS	26.160.000,00	26.160.000,00
- Uang Lembur non PNS	5.200.000,00	3.347.000,00
Total Honorarium Non PNS	283.510.000,00	271.657.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.1.2 Belanja Barang	3.664.120.600,00	3.480.283.219,00	1.746.391.975,00

Pada Tahun 2018 Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp. 3.664.120.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.480.283.219,00 atau 94,98%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Bahan Pakai Habis	286.122.000,00	252.565.183,00	137.034.650,00
b. Belanja Jasa Kantor	1.901.700.000,00	1.866.277.266,00	842.750.425,00
c. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	76.534.815,00	63.379.100,00
d. Belanja Cetak & Penggandaan	107.743.000,00	93.462.760,00	86.828.200,00
e. Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00

f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	39.350.000,00	39.350.000,00
e. Belanja Makanan dan Minuman	184.375.000,00	164.073.000,00	142.230.500,00
f. Belanja Pakaian Kerja	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
g. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	39.875.000,00	31.250.000,00
h. Belanja Perjalanan Dinas	379.590.000,00	370.781.570,00	332.904.150,00
i. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	220.940.600,00	205.287.725,00	20.000.000,00
j. Belanja Pemeliharaan	292.670.000,00	266.692.900,00	32.314.950,00
k. Belanja Jasa Konsultasi	123.000.000,00	119.453.000,00	0,00
l. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.800.000,00	22.500.000,00	16.250.000,00
Total Belanja Barang	3.664.120.600,00	3.480.283.219,00	1.746.391.975,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja alat tulis kantor	39.689.000,00	39.662.500,00
- Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	17.000.000,00	13.325.000,00
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	3.114.000,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	14.700.000,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas	58.998.000,00	51.812.183,00
- Belanja barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi	136.660.000,00	120.176.500,00
- Belanja spanduk	2.400.000,00	2.400.000,00
- Belanja baliho/banner	2.400.000,00	2.400.000,00
- Belanja barang peralatan dan perlengkapan yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi	9.975.000,00	4.975.000,00
Total Belanja Bahan Pakai Habis	286.122.000,00	252.565.183,00

b. Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja telepon	10.000.000,00	5.321.454,00
- Belanja listrik	92.000.000,00	82.399.849,00
- Belanja surat kabar/majalah	22.400.000,00	21.095.000,00
- Belanja kawat/faksimili/internet	878.000.000,00	871.369.068,00
- Belanja jasa penyedia hiburan	200.000.000,00	200.000.000,00
- Belanja jasa kebersihan/cleaning service	1.200.000,00	1.200.000,00
- Belanja jasa penyebarluasan informasi, publikasi dan iklan layanan masyarakat	690.700.000,00	682.791.895,00
- Belanja jasa dokumentasi	1.100.000,00	800.000,00
- Belanja ijin frekuensi dan ijin penyelenggaraan penyiaran	6.300.000,00	1.300.000,00
Total Belanja Jasa Kantor	1.901.700.000,00	1.866.277.266,00

c. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja jasa service	32.000.000,00	24.413.300,00
- Belanja penggantian suku cadang	40.000.000,00	38.617.943,00
- Belanja pelumas	13.000.000,00	7.247.247,00
- Belanja surat tanda nomor kendaraan	15.000.000,00	6.256.325,00
Total Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	76.534.815,00

d. Belanja Cetak dan Penggandaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja cetak	79.027.000,00	69.882.000,00
- Belanja penggandaan	28.716.000,00	23.580.760,00
Total Belanja Cetak dan Penggandaan	107.743.000,00	93.462.760,00

e. Belanja Makanan dan Minuman	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja makanan dan minuman harian pegawai	64.510.000,00	63.640.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat	55.525.000,00	45.183.000,00
- Belanja makanan dan minuman tamu	4.865.000,00	2.375.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan	59.475.000,00	52.875.000,00
Total Belanja Makanan dan Minuman	184.375.000,00	164.073.000,00

f. Belanja Pakaian Kerja	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja pakaian kerja lapangan	3.180.000,00	3.180.000,00

Total Belanja pakaian kerja lapangan	3.180.000,00	3.180.000,00
<hr/>		
g. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja pakaian batik tradisional	40.000.000,00	39.875.000,00
Total Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	39.875.000,00
<hr/>		
h. Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.740.000,00	65.020.000,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah	311.850.000,00	305.761.570,00
Total Belanja Perjalanan Dinas	379.590.000,00	370.781.570,00
<hr/>		
i. Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	24.540.600,00	10.830.000,00
- Belanja Sosialisasi	196.400.000,00	194.457.725,00
Total Belanja Pelatihan Pendidikan/ Kursus	220.940.600,00	205.287.725,00
<hr/>		
j. Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9.750.000,00	6.150.000,00
- Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	12.720.000,00	8.390.900,00
- Belanja pemeliharaan komputer	186.780.000,00	177.583.000,00
- Belanja pemeliharaan alat-alat Komunikasi	750.000,00	0,00
- Belanja pemeliharaan mebeler	7.670.000,00	869.000,00
- Belanja pemeliharaan alat-alat studio	75.000.000,00	73.700.000,00
Total Belanja Pemeliharaan	292.670.000,00	266.692.900,00
<hr/>		
k. Belanja Jasa Konsultasi Peralatan Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja jasa konsultasi komunikasi, informasi dan teknologi	123.000.000,00	119.453.000,00
Total Belanja jasa konsultasi komunikasi, informasi dan teknologi	123.000.000,00	119.453.000,00

I. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	21.000.000,00	18.700.000,00
- Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Non PNS	3.800.000,00	3.800.000,00
Total Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.800.000,00	22.500.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
2.2 BELANJA MODAL	1.579.164.400,00	1.543.417.450,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.543.417.450,00 atau 97,74%. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.252.934.550,00 atau 98,77%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 290.482.900,00 atau 93,50%.

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.489.400,00	1.252.934.550,00

Pada Tahun 2018 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 1.268.489.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.252.934.550,00 atau 98,77%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	40.200.000,00	36.378.000,00	0,00
b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	108.514.400,00	106.074.400,00	25.000.000,00
c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.700.000,00	13.476.000,00	0,00
d. Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.300.000,00	195.177.500,00	935.093.500,00
e. Belanja Modal Pengadaan Mebeler	97.100.000,00	96.850.000,00	1.800.000,00
f. Belanja Modal			

Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	1.980.000,00	0,00
g. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
h. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	449.275.000,00	445.655.000,00	46.435.000,00
i. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	40.400.000,00	40.400.000,00	9.100.000,00
j. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	200.000.000,00	199.133.650,00	0,00
k. Belanja Moda Rehabilitasi/Pemeliharaan Komputer yang dikapitalisasi	115.000.000,00	114.660.000,00	0,00
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.489.400,00	1.252.934.550,00	1.062.378.500,00

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	40.200.000,00	36.378.000,00
Total BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	40.200.000,00	36.378.000,00

b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	850.000,00	850.000,00
- Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	83.164.400,00	80.764.400,00
- Belanja modal pengadaan AC	24.500.000,00	24.460.000,00
Total BM Pengadaan Peralatan Kantor	108.514.400,00	106.074.400,00

c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan almari	9.700.000,00	9.476.000,00
- Belanja modal pengadaan tiang Bendera	1.500.000,00	1.500.000,00
- Belanja modal pengadaan mimbar/podium	2.500.000,00	2.500.000,00
Total BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.700.000,00	13.476.000,00

d. Belanja Modal Pengadaan Komputer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan komputer/PC	53.400.000,00	52.668.000,00
- Belanja modal pengadaan computer note book	24.000.000,00 8.000.000,00	23.760.000,00 7.925.500,00
- Belanja modal pengadaan printer		
- Belanja modal pengadaan peralatan jaringan computer	75.000.000,00	73.299.000,00
- Belanja modal pengadaan perangkat lunak/software	37.900.000,00	37.525.000,00
Total BM Pengadaan Komputer	198.300.000,00	195.177.500,00

e. Belanja Modal Pengadaan Mebeler	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan meja kerja	10.000.000,00	10.000.000,00
- Belanja modal pengadaan meja rapat	49.500.000,00	49.500.000,00
- Belanja modal pengadaan kursi rapat	24.000.000,00	23.900.000,00
- Belanja modal pengadaan sofa	6.000.000,00	5.850.000,00
- Belanja modal pengadaan meja Komputer	4.800.000,00	4.800.000,00
- Belanja modal pengadaan meja Resepsionis	2.800.000,00	2.800.000,00
Total BM Pengadaan Mebeler	97.100.000,00	96.850.000,00

f. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan kulkas	2.000.000,00	1.980.000,00
Total BM Pengadaan Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	1.980.000,00

g. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan gorden	4.000.000,00	4.000.000,00
Total BM Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00

h. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan TV	20.000.000,00	19.910.000,00
- Belanja modal pengadaan sound system	20.000.000,00	19.965.000,00
- Belanja modal pengadaan layar/screen	19.400.000,00	18.920.000,00
- Belanja modal pengadaan kamera/tustel	88.275.000,00	87.945.000,00

- Belanja modal pengadaan Peralatan studio audio	301.600.000,00	298.915.000,00
Total BM Pengadaan Alat-alat Studio	449.275.000,00	445.655.000,00

i. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan alat sandi	40.400.000,00	40.400.000,00
Total BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi	40.400.000,00	40.400.000,00

j. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan generator	200.000.000,00	199.133.650,00
Total BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	200.000.000,00	199.133.650,00

k. Belanja Modal Rehabilitasi/ Pemeliharaan Komputer yang Dikapitalisasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan jaringan komputer yang dikapitalisasi	115.000.000,00	114.660.000,00
Total BM Rehabilitasi/Pemeliharaan Komputer yang dikapitalisasi	115.000.000,00	114.660.000,00

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
2.2.2 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	310.675.000,00	290.482.900,00	266.532.000,00

Pada Tahun 2017 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 268.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 266.532.000,00 atau 99,45%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut

	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	241.475.000,00	221.682.900,00	89.707.000,00
Belanja Modal Rehabilitas/ Pemeliharaan Bangunan yang Dikapitalisasi	69.200.000,00	68.800.000,00	176.825.000,00

Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.675.000,00	290.482.900,00	266.532.000,00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini :

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian papan/tempat reklame	241.475.000,00	221.682.900,00
Total Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan	241.475.000,00	221.682.900,00

Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan yang Dikapitalisasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
- Belanja modal rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor yang dikapitalisasi	69.200.000,00	68.800.000,00
Total Belanja Modal Rehabilitasi / Pemeliharaan Bangunan yang Dikapitalisasi	69.200.000,00	68.800.000,00

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 486.700.002,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp. 7.689.859.506,88, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 7.203.159.504,88. Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,00, sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (7.203.159.504,88).

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1. PENDAPATAN-LO	486.700.002,00	0,00	486.700.002,00
2. BEBAN	7.689.859.506,88	6.976.807.675,00	713.051.831,88
3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.203.159.504,88)	(6.976.807.675,00)	(226.351.829,88)
4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00

5. POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
6. SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.203.159.504,88)	0,00	(7.203.159.504,88)

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1. PENDAPATAN-LO			
	486.700.002,00	0,00	486.700.002,00

Jumlah Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 486.700.002,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2. BEBAN			
	7.689.859.506,88	6.976.807.675,95	657.877.330,93

Jumlah Beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora per 31 Desember 2018 Rp. 7.689.859.506,88 Terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 3.431.381.530,00, Beban Persediaan sebesar Rp. 344.244.943,00, Beban Jasa sebesar 2.496.355.631,00, Beban Pemeliharaan sebesar 266.692.900,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 370.781.570,00 dan Beban Penyusutan sebesar Rp. 577.042.932,88.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.1 BEBAN PEGAWAI			
	3.431.381.530,00	5.121.440.453,00	1.690.058.923,00

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 Rp. 3.431.381.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Gaji dan Tunjangan	1.966.384.530,00	3.512.879.053,00	1.546.494.523,00
b. Beban Tambahan Penghasilan PNS	901.420.000,00	1.162.114.400,00	260.694.400,00
c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00

d. Beban Honorarium PNS	278.675.000,00	238.775.000,00	39.900.000,00
d. Beban Honorarium Non PNS	271.657.000,00	202.672.000,00	68.985.000,00
Jumlah Beban Pegawai	3.431.381.530,00	5.121.440.453,00	1.936.923.923,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.2 BEBAN PERSEDIAAN	344.244.943,00	223.862.850,00	88.615.368,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **349.328.943,00**. Jumlah beban barang dan jasa ini merupakan jumlah sesudah adanya Koreksi atas Beban Persediaan pada Jurnal Penyesuaian dalam kolom Debit, dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Bahan Pakai Habis	255.866.183,00	107.947.675,00	147.918.508,00
b. Beban cetak dan Penggandaan	93.462.760,00	115.915.175,00	22.452.415,00
Jumlah	349.328.943,00	223.862.850,00	170.370.923,00

Sedangkan Jumlah Koreksi atas adanya Koreksi atas Beban Persediaan pada Jurnal Penyesuaian pada kolom Kredit yaitu sebesar Rp. 5.084.000,00. Sehingga jumlah Beban Persediaan yaitu Pengurangan dari Rp. 349.328.943,00 dan Rp. 5.084.000,00 yaitu sebesar **Rp. 344.244.943,00**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.3 BEBAN JASA	2.496.355.631,00	861.305.614,00	1.321.213.912,00

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **2.505.972.555,00**. Jumlah beban jasa ini merupakan jumlah sesudah adanya Koreksi atas Utang Jangka Pendek pada Jurnal Penyesuaian dalam kolom Debit, dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Jasa Kantor	1.875.069.015,00	543.746.014,00	1.331.323.001,00
b. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	76.534.815,00	63.379.100,00	13.155.715,00
c. Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
d. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	39.350.000,00	39.350.000,00
e. Beban Makanan dan Minuman	164.073.000,00	142.230.500,00	21.842.500,00
f. Beban Pakaian Kerja	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
g. Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	39.875.000,00	31.250.000,00	8.625.000,00
h. Beban Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	205.287.725,00	20.000.000,00	185.287.725,00
i. Beban Jasa Konsultasi Peralatan Kantor	119.453.000,00	0,00	119.453.000,00
j. Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	22.500.000,00	16.250.000,00	6.250.000,00
k. Beban Iuran APPKASI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah Beban Jasa	2.505.972.555,00	861.305.614,00	1.733.566.941,00

Sedangkan Jumlah Koreksi atas adanya Koreksi atas Utang Jangka Pendek pada Jurnal Penyesuaian pada kolom Kredit yaitu sebesar Rp. 9.616.924,00. Sehingga jumlah Beban Jasa yaitu Pengurangan dari Rp. 2.505.972.555,00 dan Rp. 9.616.924,00 yaitu sebesar **Rp. 2.496.355.631,00.**

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.4 BEBAN PEMELIHARAAN	266.692.900,00	32.314.950,00	234.377.950,00

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 Rp. 266.692.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.150.000,00	5.185.000,00	965.000,00
b. Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.390.900,00	7.980.000,00	410.900,00
c. Beban Pemeliharaan Komputer	177.583.000,00	19.149.950,00	158.433.050,00
d. Beban Pemeliharaan Mebeler	869.000,00	0,00	869.000,00
e. Beban Pemeliharaan Alat-alat Studio	73.700.000,00	0,00	73.700.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	266.692.900,00	32.314.950,00	234.377.950,00

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS	370.781.570,00	332.904.150,00	37.877.420,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 Rp. 370.781.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.020.000,00	86.460.000,00	21.440.000,00
b. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	305.761.570,00	246.444.150,00	59.317.420,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas	370.781.570,00	332.904.150,00	80.757.420,00
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.5 BEBAN PENYUSUTAN	577.042.932,88	404.979.658,95	116.888.773,92

Jumlah Beban Penyusutan per 31 Desember 2018 Rp. **577.042.932,88** dengan rincian sebagai berikut:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
a. Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	496.554.828,04	390.769.333,45	105.785.494,59
b. Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	15.773.900,67	8.136.846,33	7.637.054,34
c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	9.539.704,17	6.073.479,17	3.466.225,00
Jumlah Beban Penyusutan	521.868.432,88	404.979.658,95	116.888.773,93

Jumlah beban penyusutan sebesar Rp. 521.868.432,88 ditambah beban amortisasi aset tak berwujud > 20 juta sebesar Rp. 55.174.500,00 sehingga total Beban Penyusutan sebesar Rp. 577.042.932,88.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2.6 BEBAN LAIN-LAIN	203.360.000,00	0,00	203.360.000,00

Beban Lain-lain ini berasal dari Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi. Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2018 Rp. 203.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan Mesin yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi
2. Belanja Modal Peralatan Mesin yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi

1. Belanja Modal Peralatan Mesin yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi

Yang termasuk Beban Lain-lain dari Belanja Modal Peralatan Mesin yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi, dengan rincian sebagai berikut :

		2018 (Rp)	2017 (Rp)
Komputer	Rp.	114.660.000,00	0,00
Peralatan Jaringan Komputer	Rp.	114.660.000,00	0,00
Alat-alat Studio	Rp.	19.900.000,00	0,00
Amplifier	Rp.	19.900.000,00	0,00
Jumlah	Rp.	134.560.000,00	(0,00)

2. Belanja Modal Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi

Yang termasuk Beban Lain-lain dari Belanja Modal Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat Kapitalisasi, dengan rincian sebagai berikut :

		2018 (Rp)	2017 (Rp)
Gedung Kantor	Rp.	68.800.000,00	0,00
Gedung Kantor	Rp.	68.800.000,00	0,00
Jumlah	Rp.	68.800.000,00	(0,00)

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.203.159.504,88)	(6.976.807.675,95)	(171.177.328,93)

Nilai Surplus/Defisit dari operasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (7.203.159.504,88). Nilai Surplus/Defisit ini merupakan selisih dari Jumlah Pendapatan dan Jumlah Beban.

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 2.779.003.944,69 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (7.203.159.504,88) kemudian dikurangi lain-lain sebesar Rp. – 58.035.164,93, sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar (4.482.190.725,12)

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. EKUITAS AWAL	2.779.003.944,69	49.556.625.737,86
2. SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.203.159.504,88)	(6.976.807.675,95)
3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	-58.035.164,93	-47.997.557.045,22
4. EKUITAS AKHIR	(4.482.190.725,12)	(Rp.5.417.738.983,31)

Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. EKUITAS AWAL	2.779.003.944,69	49.556.625.737,86

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2018 Rp. 2.779.003.944,69. Jumlah Ekuitas Awal tersebut berasal dari Jumlah Ekuitas Akhir pada periode Tahun sebelumnya.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
2. SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.203.159.504,88)	(6.976.807.675,95)

Nilai Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (7.203.159.504,88) Defisit-LO per 31 Desember 2018 merupakan selisih kurang antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional.

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
LAIN-LAIN	-58.035.164,93	-47.997.557.045,22

Koreksi Nilai Aset Tetap untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 Rp. - 58.035.164,93. Nilai Lain-lain per 31 Desember 2018 merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan Ekuitas pada Jurnal Penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan:

- Koreksi Aset	Rp.	74.808.944,08
Jumlah	Rp.	74.808.944,08

Pengurangan:

- Koreksi Aset	Rp.	16.773.779,15
Jumlah	Rp.	16.773.779,15

Selisih (KOREKSI NILAI ASET TETAP)	Rp.	-58.035.164,93
---	------------	-----------------------

2018
(Rp)

2017
(Rp)

4. EKUITAS AKHIR

(4.482.190.725,12) (5.417.738.983,31)

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (4.482.190.725,12). Ekuitas Akhir tersebut merupakan hasil dari Ekuitas Awal dikurangi Defisit-LO dan Lain-lain.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Nomor 11) tanggal 26 September 2016. Sedangkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora yaitu Peraturan Bupati Bora Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora tanggal 16 Desember 2016.

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

- Subbagian Program dan Keuangan;
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Teknologi dan Informasi, membawahkan:

- Seksi Aplikasi Informatika;
- Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi; dan
- Seksi Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.

d. Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahkan:

- Seksi Media Dalam dan Luar Ruang;
- Seksi Televisi, Radio, Film dan Pers; dan
- Seksi Kemitraan dan Keterbukaan Informasi Publik.

e. Bidang Statistik Persandian Telekomunikasi, membawahkan:

- Seksi Statistik
- Seksi Persandian; dan
- Seksi Telekomunikasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumasan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepegawaian (PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora Tahun 2018 meliputi:

- Jumlah Pegawai : 29 orang
- Kualifikasi Pendidikan : SD (1 orang), SMP (1 orang), SMA (5 orang), Diploma III (1 orang), Strata I (13 orang), Strata II (8 orang)
- Golongan : Gol. I (2 orang), Gol. II (3 orang), Gol. III (15 orang), Gol. IV (9 orang)
- Jumlah Pejabat Struktural (16 orang)
- Jenis Kelamin : Laki-laki (21 orang) dan Perempuan (8 orang)
- Pejabat Fungsional 1 orang

Dalam Tahun 2018 terjadi perubahan jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora, semula 30 orang menjadi 29 orang. Perubahan tersebut dikarenakan adanya Pegawai yang memasuki batas usia Pensiun (Purna Tugas) sebanyak 1 orang.

Lokasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora terletak di Jalan Gor Mustika no 5 Bora.

BAB VII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora khususnya dan Pemerintah Kabupaten Blora pada umumnya dimasa yang akan datang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Blora, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran

Drs. SUGIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198103 1 003